

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018).

Ashiddiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003).

\_\_\_\_\_. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000)

Djaja, Ermasjah. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) “Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Farisi, Mohammad. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

Hakim, Lukman. Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2010).

Huda, Ni'matul. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

\_\_\_\_\_. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

Indrayana, Denny. Jangan Bunuh KPK, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008).

\_\_\_\_\_. Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008).

Lee Roy, Crince. Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo (Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981).

Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Suradi. Pendidikan Anti Korupsi, (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

## **Jurnal**

Aris, Ismail. “Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No, 36/Puu-Xv/2017 Dan No. 40/Puu-Xv/2017).” Jurnal Jurisprudentie 5 No 1, Juni 2018.

Rannie, Mahesa. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.2, Juni 2021.

Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga Badan Komisi Negara Independen di Indonesia: Tujuan Hukum Tata Negara." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3, 2005.

Ackerman, Bruce. "The new Separation of Power." Harvard Law Review, Nomor 3, Volume 113:633, 2000.

Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43. No. 1, 2014.

Tauda, Gunawan. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal Pranata Hukum 6 (2), 2011.

Syafar, Dzulkifili. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi." Journal of Lex Generalis, Vol. 1, No. 7, 2021.

## **Makalah**

Muchsan. Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN, (Makalah Seminar Yogyakarta, 1991).

## **Surat Kabar**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK.” [DPR.go.id](http://DPR.go.id), 17 September 2019.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, “Kpk Bukan Eksekutif.” [Geotimes](http://Geotimes), 1 Maret 2018.

Gabrillin, Abba, “Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Akan Sampaikan Hasil Kajian Hak Angket KPK.” [Kompas](http://Kompas), 14 Juni 2017.

Sucahyo, Nurhadi, “Pusat Kajian Anti-Korupsi: KPK Perlu Masuk dalam Konstitusi.” [VOA Indonesia](http://VOAIndonesia), 12 Desember 2012.

Zulfikar, Muhammad, “Ahli: Alih status pegawai KPK jadi ASN berisiko pada independensi.” [Antara News](http://AntaraNews), 6 Mei 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

United Nations Convention Against Corruption, Pasal 6 ayat (1), 2003.

Mahkamah Konstitusi. Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021 “Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”.

Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pada 3 Februari 2020.

Naskah Akademik Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.